

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BINJAI 2019



<https://binjaikota.bps.go.id>



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BINJAI 2019

<https://binjai.go.id>



INDEKS
KEMAHALAN KONSTRUKSI
KOTA BINJAI 2019

No. ISBN : 978-623-91552-3-0
No. Publikasi : 12760.1914
Katalog BPS : 7102025.1276
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 57 halaman

Naskah:

Seksi Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Penyunting Naskah:

Seksi Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Gambar Kover oleh:

Seksi Distribusi Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Diterbitkan oleh:

© BPS Kota Binjai

Dicetak oleh:

CV. Rilis Grafika

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

TIM PENYUSUN

INDEKS

KEMAHALAN KONSTRUKSI

KOTA BINJAI 2019

Penanggung Jawab Umum

Ir. Ida Suswati, M.Si

Koordinator

Editor dan Penanggung Jawab Teknis

Cornelia Tenar Mannita Tarigan, SE, MM

Ulasan

Gambar Grafik

Gambar Kulit

Tata Letak

Deby Ayuningtias, A.Md

KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Binjai Tahun 2019 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi Kota Binjai dibandingkan kota acuan yaitu Kota Semarang. Data IKK Kota Binjai Tahun 2019 diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, upah jasa konstruksi yang dilaksanakan Kota Binjai. Data dihitung berdasarkan data harga triwulanan bulan Juli 2018, Oktober 2018, Januari 2019 dan April 2019. Diagram timbang penghitungan IKK menggunakan data *Bill of Quantity (BoQ)* dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi IKK Kota Binjai Tahun 2019 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saran serta kritik dari seluruh pengguna sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Binjai, Oktober 2019
Badan Pusat Statistik Kota Binjai,
Kepala,



Ida Suswati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	3
2. Konsep dan Defenisi	7
BAB II. METODOLOGI	15
1. Konsep Pemikiran	17
2. Metode Penghitungan IKK.....	19
BAB III. URAIAN SINGKAT.....	21
1. IKK 2019.....	23
2. IKK Kota Binjai 2019	31
BAB IV. LAMPIRAN.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019	27
Tabel 3.2	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019	30
Gambar 3.2	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019.....	32
Gambar 3.3	Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, serta Kota Semarang Tahun 2019	36

The background is a dark blue gradient with faint, white technical drawings of mechanical parts, including gears, shafts, and cross-sections, overlaid on the surface.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didaerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan Otonomi Daerah ini selain dapat mendorong percepatan pembangunan juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utamanya adalah sebagai pemerataan keuangan antar daerah. Dengan harapan, kebijakan Otonomi Daerah dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal dan terbelakang, baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alamnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas

wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata.

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU. No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), luas wilayah dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai salah satu variabel penghitungan DAU merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, upah jasa konstruksi dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah diperoleh dari Survei IKK yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Survei tersebut dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity (BoQ)*. *BoQ* adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 3 jenis bangunan yang ditentukan. Ketiga jenis bangunan ini yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan; serta bangunan lainnya.

2. Konsep dan Definisi

- A. Indeks Kemahalan Konstruksi** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi acuan untuk periode waktu tertentu. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.
- B. Tingkat Kemahalan Konstruksi** adalah cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga

sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

C. Kelompok Jenis Bangunan

Pada awal penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi, Kelompok bangunan/konstruksi yang digunakan terdiri dari 5 kelompok bangunan/konstruksi yaitu: Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal; Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Pertanian, Bangunan Pekerjaan Umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, dan Bangunan Lainnya.

Namun karena tidak semua kabupaten/kota memiliki kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisik berupa Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Pertanian dan Bangunan untuk Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, maka mulai tahun 2005 kelompok bangunan yang digunakan untuk penghitungan IKK terdiri dari 3 kelompok bangunan/konstruksi, yaitu:

- 1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal**, kegiatan konstruksi yang termasuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah sebagai berikut:

- Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas
- Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, kegiatan konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah :

- Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
- Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.
- Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.

3. Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk pertanian, instalasi listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya, diantaranya:

- Pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.
- Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
- Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit, instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

- Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
- Bangunan terowongan, Bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman).

D. Paket Komoditas IKK adalah suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2019, diasumsikan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 47, terdiri dari 33 jenis bahan bangunan dan 6 sewa alat berat dan 8 jasa konstruksi.

- E. **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
- F. **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
- G. **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.
- H. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.
- I. **Pedagang eceran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.
- J. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal ataupun sarana lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud

disini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi

- K. Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun
- L. Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.
- M. Kepala Tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.

- N. Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass.
- O. Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
- P. Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya
- Q. Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dan lain-lain.

Komponen Bangunan Penyusun IKK

Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal



Rumah



Gedung Kantor



Gedung Pendidikan



Tempat Ibadah

DII

Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan



Jalan



Jembatan



Pelabuhan

DII

Bangunan Lainnya



Instalasi Listrik



Instalasi Gas



Jaringan Komunikasi

DII



BADAN PUSAT STATISTIK

BAB II

METODOLOGI

1. Konsep Pemikiran

IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi karenanya didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat

semua material penting yang digunakan digabung dengan upah sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing.

Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap dan sebagainya.

Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output, karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi

mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

2. Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2019 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \sum_{k=1}^n \rho_k . q_k$$

Dengan

NK : Nilai Komponen

ρ_k : Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k : Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi *CPD* adalah sebagai berikut:

$$\ln NK = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Dengan:

NK: Nilai Komponen

Ci: dummy kabupaten/kota

Pj: dummy komponen dalam suatu sistem

α dan β : Koefisien regresi

PPP sistem : $\exp(\alpha)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometric dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan} = \left(\pi_{i=1}^n PPP_{sistem_i} \right)^{1/n}$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kabkot} = \left[\pi_{i=1}^n (PPP_{bangunan_i})^{bobot_i} \right] \cdot 100$$

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2019



SEMARANG

100,00



BINJAI

100,63



Kab/Kota dengan 5 IKK
tertinggi di Sumatera Utara

01 Papua

Papua Barat 02

03 Kepulauan
Riau

Maluku 04

05 Maluku Utara



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

BAB III

URAIAN SINGKAT

1. IKK 2019

IKK adalah salah satu indeks yang merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah. DAU dihitung dengan menjumlahkan Alokasi Dasar (AD) dengan Celah Fiskal (CF). Salah satu komponen dalam celah fiskal adalah indeks kemahalan konstruksi.

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *BoQ* tahun 2003. Perkembangan teknik sipil yang sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan menyebabkan banyaknya material bangunan/konstruksi yang sudah berubah atau berubah model seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium dan lain sebagainya. Selain itu, peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan *BoQ* 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan.

Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan *BoQ* terbaru yang dikumpulkan tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2019 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating *BoQ* sampai tahun 2018.

IKK tahun 2019 menggunakan data harga komoditas konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu : Juli 2018, Oktober 2018, Januari 2019 dan April 2019. Seperti halnya IKK 2018, IKK tahun 2019 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti IHPB atau IHK, dimana indeks periodikal merupakan angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu

bilangan/*inflator*. Mulai tahun 2010, IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2010, Kota Samarinda adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491 Kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dipilih sebagai kota acuan. Untuk tahun 2019, kota Semarang dijadikan kota acuan dengan angka IKK sebesar 100,00. Dengan demikian Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi acuan untuk angka IKK provinsi se Indonesia.

Kondisi geografis suatu wilayah juga memberikan pengaruh terhadap besaran IKK yang dalam penghitungannya juga memasukkan komponen harga bahan bangunan/konstruksi. Suatu wilayah kabupaten/kota yang terletak di pegunungan biasanya memiliki akses distribusi barang yang sulit. Hal ini menyebabkan tingginya harga suatu komoditas di daerah tersebut akibat transportasi yang kurang baik. Kondisi ini umumnya terjadi di kabupaten/kota diluar pulau Jawa.

Tabel 3.1. dibawah ini menunjukkan angka IKK Provinsi di Indonesia tahun 2019. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa provinsi dengan IKK tertinggi adalah Provinsi Papua dengan IKK sebesar 218,59. Sedangkan provinsi dengan IKK terendah adalah Provinsi Lampung dengan IKK sebesar 88,84. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu satuan bangunan/konstruksi di Provinsi Papua lebih besar 118,59 persen dari Provinsi Lampung. Kondisi geografis yang sulit menyebabkan tingginya harga komoditas bangunan/konstruksi di provinsi tersebut.

Tabel 3.1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1100	A c e h	98,68
2.	1200	Sumatera Utara	102,79
3.	1300	Sumatera Barat	93,72
4.	1400	R i a u	94,92
5.	1500	J a m b i	94,38
6.	1600	Sumatera Selatan	94,50
7.	1700	Bengkulu	94,74
8.	1800	Lampung	88,84
9.	1900	Kep Bangka Belitung	101,27
10.	2100	Kepulauan Riau	128,34
11.	3100	DKI Jakarta	114,06
12.	3200	Jawa Barat	103,03
13.	3300	Jawa Tengah	99,93
14.	3400	DI Yogyakarta	103,42
15.	3500	Jawa Timur	103,68

16.	3600	Banten	95,84
17.	5100	B a l i	119,10
18.	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19.	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20.	6100	Kalimantan Barat	111,53
21.	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22.	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23.	6400	Kalimantan Timur	114,37
24.	6500	Kalimantan Utara	112,11
25.	7100	Sulawesi Utara	108,32
26.	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27.	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28.	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29.	7500	Gorontalo	97,45
30.	7600	Sulawesi Barat	92,27
31.	8100	M a l u k u	123,02
32.	8200	Maluku Utara	119,11
33.	9100	Papua Barat	132,67
34.	9400	P a p u a	218,59

Sumber: Badan Pusat Statistik

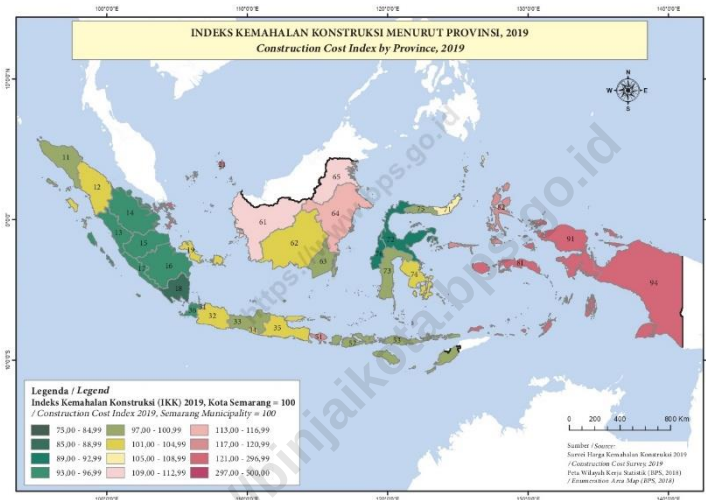
Bila dilihat dari urutannya secara nasional, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan 15 dengan angka IKK sebesar 102.79. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk membangun satu satuan bangunan/ konstruksi di Provinsi Sumatera Utara lebih mahal 2,79 persen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi acuan. Berikut provinsi dengan IKK terbesar tahun 2019 yaitu :

1. Provinsi Papua
2. Provinsi Papua Barat
3. Provinsi Kep. Riau
4. Provinsi Maluku
5. Provinsi Maluku Utara

Sedangkan urutan lima provinsi dengan IKK terkecil adalah :

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Sulawesi Tengah
3. Provinsi Sulawesi Barat
4. Provinsi Sumatera Barat
5. Provinsi Jambi

Gambar 3.1.
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019



Gambar diatas, menunjukkan besaran IKK dari masing-masing provinsi di Indonesia menurut wilayah geografis. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Papua memiliki angka IKK tertinggi diatas provinsi acuan. Hal ini dapat dilihat dari warna merah yang menunjukkan angka IKK diatas 120. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebagian provinsi dengan angka IKK yang tinggi umumnya berada di luar Jawa, khususnya kawasan Indonesia Timur. Kondisi geografis yang sulit serta prasarana yang kurang memadai menyebabkan distribusi

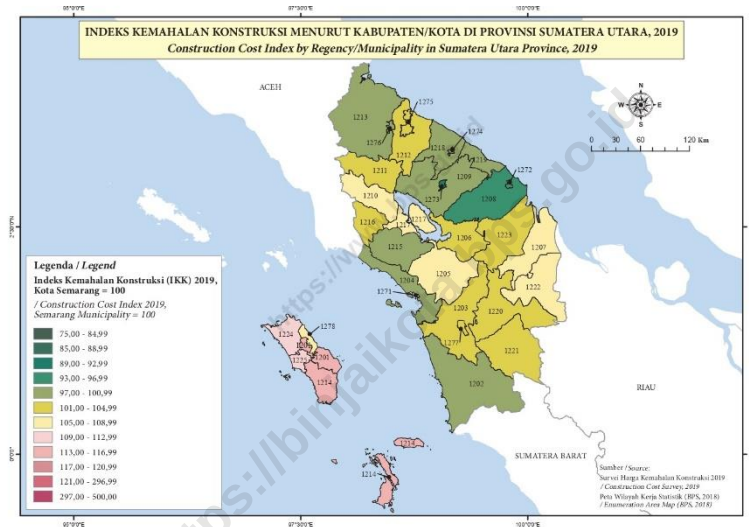
komoditas yang sulit sehingga mengakibatkan tingginya harga-harga komoditas khususnya bahan bangunan/konstruksi.

2. IKK Kota Binjai 2019

IKK terdiri dari IKK kabupaten/kota dan provinsi, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) secara umum dari suatu daerah terhadap daerah lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/ konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas.

Gambar di bawah ini menunjukkan besaran IKK di masing-masing kabupaten/kota yang dilihat dari letak geografis masing-masing. Harga komoditas di suatu kabupaten/kota juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Untuk daerah dengan kondisi geografis pegunungan biasanya memiliki akses dan distribusi barang yang lebih sulit jika dibandingkan daerah dataran. Hal ini mengakibatkan harga-harga komoditas biasanya menjadi mahal.

Gambar 3.2
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019



Tabel 3.2. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019

Kode	Provinsi	IKK	Urutan
(1)	(2)	(3)	(4)
1201	N i a s	114,17	2
1202	Mandailing Natal	100,55	17
1203	Tapanuli Selatan	104,88	12
1204	Tapanuli Tengah	100,30	24
1205	Tapanuli Utara	105,39	10
1206	Toba Samosir	102,28	18
1207	Labuhan Batu	106,74	8
1208	A s a h a n	94,53	31
1209	Simalungun	98,60	28
1210	D a i r i	105,39	11
1211	K a r o	102,50	16
1212	Deli Serdang	101,01	22
1213	L a n g k a t	98,74	27
1214	Nias Selatan	114,34	1
1215	Humbang Hasundutan	99,74	25
1216	Pak Pak Bharat	102,81	15
1217	S a m o s i r	105,80	9

1218	Serdang Bedagai	99,21	26
1219	Batubara	97,63	29
1220	Padang Lawas Utara	104,42	13
1221	Padang Lawas	103,40	14
1222	Labuhan Batu Selatan	107,71	6
1223	Labuhan Batu Utara	102,17	20
1224	Nias Utara	111,02	3
1225	Nias Barat	109,90	4
1271	Sibolga	108,25	5
1272	Tanjung Balai	94,30	32
1273	Pematang Siantar	91,04	33
1274	Tebing Tinggi	97,37	30
1275	Medan	102,11	21
1276	Binjai	100,63	23
1277	Padang Sidempuan	102,24	19
1278	Gunung Sitoli	107,45	7
Sumatera Utara		102,79	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, secara umum untuk Provinsi Sumatera Utara rata-rata Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2019 adalah 102,79. Artinya harga rata-rata satu satuan bangunan/konstruksi di kabupaten/kota di Sumatera Utara lebih tinggi 2,79 persen dibandingkan dengan kota acuan Semarang.

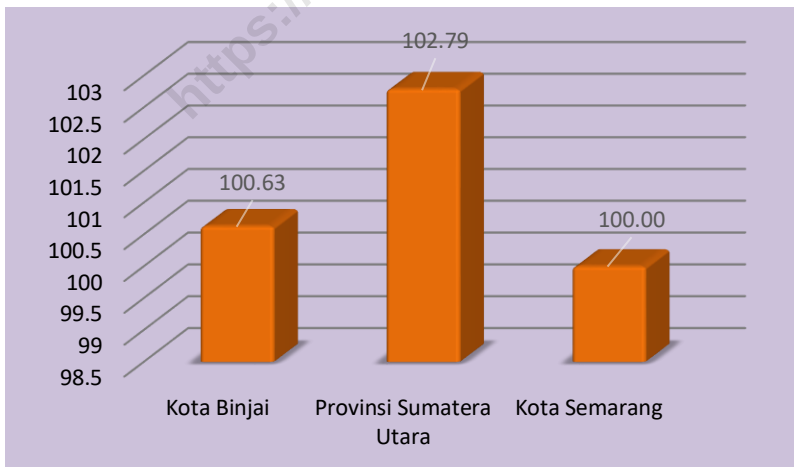
Kabupaten/kota dengan IKK 5 tertinggi di Sumatera Utara secara berurutan adalah sebagai berikut : (1) Kabupaten Nias Selatan (IKK=114,34); (2) Kabupaten Nias (IKK=114,17); (3) Kabupaten Nias Utara (IKK=111,02); (4) Kabupaten Nias Barat (IKK=109,90); (5) Kota Sibolga (IKK=108,25).

Sedangkan kabupaten/kota dengan IKK 5 terendah di Sumatera Utara adalah (1) Kota Pematang Siantar (IKK=91,04); (2) Kota Tanjung Balai (IKK=94,30); (3) Kabupaten Asahan (IKK=94,53); (4) Kota Tebing Tinggi (IKK=97,37); (5) Kabupaten Batu Bara (IKK=97,63).

Angka IKK di atas 100, menunjukkan bahwa biaya/harga satu satuan bangunan di kabupaten/kota tersebut lebih mahal dari kota acuan, sedangkan angka IKK dibawah 100, menunjukkan bahwa biaya/harga satu satuan bangunan di kabupaten/kota tersebut lebih rendah dari kota acuan.

Kota Binjai menempati urutan ke 22 atau nomor 12 (sebelas) paling rendah di Sumatera Utara dengan IKK sebesar 100,63. Angka ini menunjukkan bahwa jika di Kota Semarang membutuhkan biaya Rp. 1.000.000,- untuk membangun satu satuan bangunan, maka di Kota Binjai dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.006.300,- untuk membangun satu satuan bangunan. Artinya biaya/harga satu satuan bangunan/konstruksi di Kota Binjai lebih tinggi 0,63 persen dibandingkan dengan Kota Semarang.

Gambar 3.3. Perbandingan IKK Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, serta Kota Semarang Tahun 2019



Dilihat dari urutannya, Kota Binjai menempati urutan ke 22, artinya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu bangunan/konstruksi di Kota Binjai dibandingkan dengan 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara termasuk yang rendah. Hal ini mungkin saja disebabkan karena kondisi geografis Kota Binjai yang relatif mudah untuk dicapai dengan berbagai alat transportasi, serta kondisi prasarana yang cukup memadai sehingga arus distribusi barang relatif tidak mengalami hambatan.

Kelancaran arus distribusi barang serta akses menuju Kota Medan sebagai pusat ekonomi di Sumatera Utara ikut memberikan andil dalam pembentukan angka IKK, dimana harga bahan-bahan bangunan relatif lebih rendah. Kemungkinan ini disebabkan karena barang-barang natural seperti pasir, batu, tanah urug serta batu bata, sumbernya umumnya berasal dari Kota Binjai.

The background is a dark blue gradient with a complex, light blue architectural drawing overlaid. The drawing includes various geometric shapes, circles, and lines, resembling a technical or engineering blueprint. A large, irregular yellow shape with a black outline is positioned in the lower-left quadrant, serving as a backdrop for the text.

LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI
SEWA ALAT BERAT DAN UPAH JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK**

PERIODE : JANUARI 2019

VIKK2019

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di Ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kuualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kuualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kuualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi	
2. Kabupaten / Kota	

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS

1. Nama Pencacah	6. Nama Pengawas
2. NIP Pencacah	7. NIP Pengawas
3. Tanggal Pencacahan	8. Tanggal Pengawasan
4. Tanda Tangan Pencacah	9. Tanda Tangan Pengawas

[illegible]

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4. PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

[illegible]

[illegible]

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4. PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERWAKU UTAMAKAN MENCACAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

[illegible]

[illegible]

JANUARI 2019

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR, 2. PRODUSEN, 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECEHAN, 4. PEDAGANG ECEHAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMERK. UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Sempang (buah, tulp, dus, zak, lembar, rol, dll)	Ukuran Satuan Sempang				Konversi Satuan Sempang ke Satuan Standar	Harga per Satuan Sempang (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (perusahaan/toko/pedagang)	Keterangan (merk lainya, ukuran lainya, dll)	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)						
Kayu Lapis/Tripiek	Tripiek 6 mm	I	lembar												
		II	lembar												
		III	lembar												
	Tripiek / Plywood 9 mm	I	lembar												
		II	lembar												
		III	lembar												
	Tripiek / Plywood 12 mm	I	lembar												
		II	lembar												
		III	lembar												
	Cat Emulsi CATYLAC (arflex, vitalex, dll)	Cat Tembok Eksterior	I	25 kg											
			II	25 kg											
			III	25 kg											
		Cat Tembok Interior	I	25 kg											
			II	25 kg											
			III	25 kg											
Cat Genteng	I	20 kg													
	II	20 kg													
	III	20 kg													
Cat Minyak AVIAN (alex, emco, dll)	Cat Besi/Kayu	I	kg												
		II	kg												
		III	kg												
Cat Minyak ALTEX (yoko, kembang, dll)	Cat Meni Besi/Kayu	I	kg												
		II	kg												
		III	kg												
Tegel / Keramik MULIA (esante, kadi, dll)	Keramik Uk. 30 x 30 cm (putih polos)	I	m ²												
		II	m ²												
		III	m ²												

[illegible]

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4. PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Binjai 2019

[illegible]

JANUARI 2019		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL														
PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECEPAN 4. PEDAGANG ECEPAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGGUT). UNTUK BARANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCAHAJ SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.																
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, dus, sak, kembar, rol, dll)	Ukuran Satuan Setempat					Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (perusahaan/toko/ pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C75.065	I	batang													
		II	batang													
		III	batang													
	Profil Canal "C" Tipe C75.070	I	batang													
		II	batang													
		III	batang													
	Profil Canal "C" Tipe C75.075	I	batang													
		II	batang													
		III	batang													
Profil "Omega" / Reng Tipe A	I	batang														
	II	batang														
	III	batang														
Aluminium	Profil Kusen Aluminium 3 inch	I	m													
		II	m													
		III	m													
ALEXINDO	Profil Kusen Aluminium 4 inch	I	m													
		II	m													
		III	m													
(leco, damai abadi, dll)	Aluminium Lembaran 0.5 mm, panjang 2 m, lebar 1 m	I	lembar													
		II	lembar													
		III	lembar													
	Aluminium Lembaran 1 mm, panjang 2 m, lebar 1 m	I	lembar													
		II	lembar													
Tangki Air Fiber PENGUN (profil, excel, dll)	Ukuran 350 - 450 liter	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR, 2. PRODUSEN, 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECEBAN, 4. PEDAGANG ECEBAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMERK, UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Sempit (buah, tual, ember, rot, dll)	Ukuran Satuan Sempit				Konversi Satuan Sempit ke Satuan Standar	Harga per Satuan Sempit (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (perusahaan/toko/ pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tangki Air Fiber	Ukuran 500 - 650 liter	I	buah												
		II	buah												
		III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
PENGUIN (profile: excel, dll)	Ukuran 1000 - 1100 liter	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												
Lampu	Ukuran 2000 - 2200 liter	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												
PHILLIPS	Lampu Pilar 25 W	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												
Lampu Pilar 40 W	III	buah													
	I	buah													
	II	buah													
	I	buah													
	II	buah													
Lampu TL Panjang 18 - 20 W	III	buah													
	I	buah													
	II	buah													
	I	buah													
	II	buah													
Lampu SL (TL Pendek) 18 W	III	buah													
	I	buah													
	II	buah													
	I	buah													
	II	buah													
Lampu SL (TL Pendek) 20 W	III	buah													
	I	buah													
	II	buah													
	I	buah													
	II	buah													
hamoc, chiyoda, dll)	Lampu SL (TL Pendek) 20 W	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												
MCB (SPL N 105-1983)	1 Phase 4 Ampere	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												
(metri gem, broco, dll)	1 Phase 4 Ampere	III	buah												
		I	buah												
		II	buah												
		I	buah												
		II	buah												

JANUARI 2019

PRIORITAS RESPONDER: 1. PEDAGANG GROSIR, 2. FODUSEN, 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECEBAN, 4. PEDAGANG ECEBAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BEMERK (UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK, JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Ukuran Satuan Setempat						Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responder (perusahaan/ toko/ pedagang)	Keterangan (merk lainnya, dll)		
			Prangkil (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)									
MCB (SP/11 100.19923)	1 Phase 6 Ampere	I	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		II													
		III													
SCHNEIDER (metin gear, broco, dll)	1 Phase 10 Ampere	I													
		II													
		III													

TAMAHURUB, PASIR, BATU PONDASI, BATU SPILT

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Tuliskan merk pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/nysum pialon per lembar (dalam meter) pada kolom 7 & 8. Tuliskan harga kaca/nysum pialon per lembar pada kolom 12.

BATU BATY, BATAKO

Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.

SEMENT PORTLAND, CAT EMULSI

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan merk pada kolom 5, berat per kemasan di kolom 10, dan harga per kemasan pada kolom 12.

BESI BETON, PIPA PVC

Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan panjang PIPA PVC atau BESI BETON pada kolom 7 kemudian harga per balangnya pada kolom 12.

KAYU BALOK, KAYU PAPAN

Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m3. Jika pencacahan barang ini menggunakan satuan lain selain m3, isikan panjang, lebar, dan tinggi barang tersebut pada kolom 7, 8, 9, isikan harga per m3 pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m3 (1 ton = m3), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicatat pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.

PENEGASAN PENCACAHAN IKK

1. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPILT, BATU BATY, BATAKO, KUSEN) DIPEROLEHAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERGADA DI KABUPATEN/KOTA.

2. PENCACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL, TIDAK HARUS READY STOCK

3. PEMILIHAN KUALITAS/SPEKIFIKASI BARANG HARUS SAMA SETIAP TRIVULANNYA.

4. UNTUK SEWA ALAT BESAT PADA BLOK 4, DI KOLON KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEWA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.

BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)						
JANUARI 2019						
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
Excavator PC-200	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM	(6)	Dinas PU (harga transaksi)	(7)
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Bulldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Straight Blade (S-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	Bowl Dozer	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Tandem / Vibrating Roller	8 - 10 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kurang Dari 8 ton	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Dump Truck	Kapasitas 20 ton (Tronton)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 12 ton (Engkel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Motor Grader	Kapasitas 8 ton (Coff Diesel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	≤ 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	> 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asphalt Finisher		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	60 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Generator Set	40 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	20 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
JASA KONSTRUKSI						
Upah Kepala Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Batu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Kayu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Instalatir Listrik		I	Titik		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Pembantu Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				



Sensus
Penduduk
2020

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

Jl. WR. Mongonsidi No. 22 Binjai 20714

Telp. (061) 8826571, Fax : (061) 8821146

Homepage : <http://www.binjaitkota.bps.go.id>, E-mail : bps1276@bps.go.id

ISBN 978-623-91552-3-0



9 786239 155230